

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan yaitu keadaan tidak memiliki atau kekurangan harta benda, uang, atau sumber daya lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fenomena kemiskinan tidak hanya mencerminkan ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan politik dalam suatu negara. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan karakteristik geografis yang beragam menghadapi tantangan yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan yang merata di seluruh wilayah. Disparitas tingkat kemiskinan antar provinsi masih menjadi gambaran nyata tantangan pembangunan di Indonesia (Todaro & Smith, 2020).

Kemiskinan diukur berdasarkan kemampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Tingkat kemiskinan di Indonesia bervariasi secara signifikan antara provinsi. Beberapa faktor penentu kemiskinan provinsi termiskin di Indonesia antara lain indeks pembangunan manusia, ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Di Indonesia garis kemiskinan ditentukan oleh Badan Pusat Statistik. Upaya pengentasan kemiskinan

harus melibatkan berbagai sektor, mulai dari pendidikan hingga ekonomi, untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif merupakan tujuan utama pembangunan nasional. Namun, kemiskinan masih menjadi permasalahan yang signifikan di Indonesia, terutama di provinsi-provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Bengkulu. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia masih mencapai 9,78 persen dari total penduduk (BPS, 2020). Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya akses ke pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan bagaimana kebijakan pembangunan ekonomi dapat membantu mengurangi kemiskinan.

Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah salah satu alat ukur penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah dalam jangka panjang. IPM mencakup tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat (kesehatan), pengetahuan (pendidikan), dan standar hidup yang layak (pengeluaran). Hubungan antara IPM dan kemiskinan telah banyak dikaji dalam berbagai studi empiris. (Ranis & Stewart 2012) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan kausalitas dua arah antara pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan. Peningkatan IPM dapat mendorong produktivitas dan pendapatan masyarakat, sehingga berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan. Sebaliknya, tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menghambat akses

masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang memadai, sehingga berdampak negatif pada IPM. Provinsi termiskin sering kali memiliki IPM yang lebih rendah, mencerminkan kurangnya kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

IPM adalah ukuran yang mencakup tiga dimensi dasar pembangunan manusia yaitu: Kesehatan, diukur melalui harapan hidup saat lahir, yang mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat. Pendidikan, diukur dengan rata-rata lama sekolah dan tingkat partisipasi pendidikan, yang menunjukkan akses dan kualitas pendidikan. Kesejahteraan ekonomi, diukur melalui pendapatan per kapita, yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan di Indonesia didefinisikan sebagai kondisi di mana individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup dengan layak. Peningkatan IPM adalah kunci untuk mengurangi tingkat kemiskinan di provinsi termiskin di Indonesia. Mengatasi masalah kemiskinan memerlukan pendekatan yang terintegrasi, dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Tanpa upaya yang komprehensif, kondisi kemiskinan dan rendahnya IPM akan terus berlanjut, menghambat kemajuan sosial dan ekonomi di daerah tersebut.

IPM merupakan indikator yang penting untuk mengukur kualitas hidup masyarakat. IPM mencakup tiga dimensi utama, yaitu harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), IPM dapat mempengaruhi kemiskinan melalui peningkatan kualitas hidup dan kemampuan masyarakat (UNDP, 2020). Dengan demikian, IPM yang tinggi dapat meningkatkan kesempatan ekonomi dan pendapatan masyarakat, sehingga

dapat mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, IPM merupakan salah satu faktor yang penting dalam mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Bengkulu.

Ketimpangan pendapatan adalah faktor lain yang secara teori dan empiris memiliki korelasi dengan tingkat kemiskinan. Di Indonesia, ketimpangan pendapatan yang diukur dengan indeks gini ratio menunjukkan variasi yang signifikan antar provinsi atau yang menunjukkan seberapa besar perbedaan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh (Bourguignon 2004), pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan memiliki hubungan *triangular* dengan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tidak disertai dengan distribusi pendapatan yang merata dapat menghasilkan fenomena "*trickle-down effect*" yang tidak optimal, sehingga manfaat pertumbuhan tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Provinsi-provinsi termiskin di Indonesia umumnya menghadapi masalah ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya, yang mencerminkan struktur ekonomi yang belum inklusif.

Ketimpangan pendapatan merujuk pada distribusi pendapatan yang tidak merata di antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat memperburuk kondisi kemiskinan. Ketika sebagian kecil populasi menguasai sebagian besar kekayaan, kelompok yang lebih miskin akan semakin terabaikan, sehingga sulit untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Ketimpangan pendapatan sering kali mengakibatkan akses yang tidak merata terhadap sumber daya, seperti pendidikan dan layanan kesehatan. Masyarakat yang

berpenghasilan rendah cenderung tidak memiliki akses yang memadai untuk meningkatkan keterampilan dan kesehatan mereka, yang pada gilirannya memperburuk kemiskinan. Untuk mengurangi kemiskinan, penting untuk mengatasi ketimpangan pendapatan melalui kebijakan yang mendukung pemerataan akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan peluang ekonomi.

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu faktor yang signifikan dalam mempengaruhi kemiskinan. Ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar, sehingga dapat memperburuk kemiskinan. Menurut Kuznets (1955), ketimpangan pendapatan dapat mempengaruhi kemiskinan melalui distribusi pendapatan yang tidak merata. Dengan demikian, ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menyebabkan kemiskinan yang lebih parah, karena sebagian besar pendapatan dikuasai oleh segelintir orang, sehingga kesempatan ekonomi dan pendapatan bagi masyarakat miskin menjadi terbatas. Oleh karena itu, ketimpangan pendapatan merupakan salah satu faktor yang penting dalam mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Bengkulu.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah faktor yang menggambarkan persentase penduduk dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Pengangguran memiliki hubungan yang erat dengan kemiskinan karena berdampak langsung pada pendapatan dan konsumsi rumah tangga. Penelitian yang dilakukan oleh (Fields 2012) mengungkapkan bahwa pengangguran merupakan determinan signifikan dari kemiskinan di negara

berkembang. Lebih lanjut, struktur pengangguran di Indonesia memiliki karakteristik yang unik, di mana pengangguran tidak hanya terjadi pada kelompok dengan pendidikan rendah, tetapi juga pada kelompok dengan pendidikan tinggi, yang mencerminkan adanya ketidaksesuaian (*mismatch*) antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Badan Pusat Statistik mendefinisikan pengangguran sebagai kelompok penduduk yang aktif mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha atau pekerjaan baru, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta yang tidak aktif mencari kerja dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

TPT sering digunakan sebagai indikator kesehatan ekonomi suatu daerah. Tingkat pengangguran yang tinggi berkontribusi langsung terhadap peningkatan kemiskinan. Ketika banyak orang tidak memiliki pekerjaan, pendapatan rumah tangga menurun, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pengangguran terbuka sering kali terjadi di daerah dengan akses terbatas terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, yang membuat individu sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Untuk mengurangi kemiskinan, penting untuk mengatasi masalah pengangguran melalui kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan akses pendidikan.

TPT merupakan salah satu indikator yang penting dalam mengukur kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. TPT yang tinggi dapat menyebabkan kemiskinan karena kurangnya kesempatan ekonomi dan pendapatan bagi masyarakat. Menurut Todaro (2000), pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan melalui kurangnya kesempatan ekonomi dan pendapatan. Dengan demikian, TPT yang tinggi dapat

menyebabkan kemiskinan yang lebih parah, karena masyarakat tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, TPT merupakan salah satu faktor yang penting dalam mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Bengkulu.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah faktor lainnya yang menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya penawaran tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Menurut studi yang dilakukan oleh *International Labour Organization* (ILO, 2019), TPAK yang rendah, terutama di kalangan perempuan, berkontribusi pada tingginya tingkat kemiskinan di negara berkembang. Di provinsi-provinsi termiskin Indonesia, TPAK cenderung lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya, yang mencerminkan rendahnya partisipasi penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi produktif.

TPAK mencerminkan seberapa besar proporsi penduduk yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dan dapat menjadi indikator kesehatan ekonomi suatu daerah. TPAK yang rendah dapat berkontribusi pada peningkatan kemiskinan. Ketika banyak individu tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi, pendapatan rumah tangga menurun, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar. Rendahnya TPAK sering kali disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja yang layak. Hal ini menciptakan siklus di mana kemiskinan menghambat partisipasi angkatan kerja, dan sebaliknya, rendahnya partisipasi angkatan kerja memperburuk kemiskinan.

TPAK memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi termiskin di Indonesia. Untuk mengurangi kemiskinan, penting untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja melalui kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan akses pendidikan.

TPAK merupakan salah satu indikator yang penting dalam mengukur keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. TPAK yang tinggi dapat meningkatkan kesempatan ekonomi dan pendapatan bagi masyarakat, sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Menurut Becker (1964), TPAK dapat mempengaruhi kemiskinan melalui peningkatan kesempatan ekonomi dan pendapatan. Dengan demikian, TPAK yang tinggi dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, TPAK merupakan salah satu faktor yang penting dalam mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Bengkulu.

Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, termasuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar provinsi dan mendorong pembangunan di daerah tertinggal. Namun, studi yang dilakukan oleh (Suryahadi et al, 2018) menunjukkan bahwa efektivitas transfer fiskal dalam mengurangi kemiskinan masih belum optimal, terutama di provinsi-provinsi dengan infrastruktur yang kurang memadai dan kapasitas kelembagaan yang lemah.

Di Indonesia, beberapa provinsi memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan lainnya. Berikut ini tabel persentase tingkat kemiskinan berdasarkan 38 provinsi di Indonesia pada tahun 2010 dan tahun 2024.

Tabel 1.1

Persentase Rata-Rata Tingkat Kemiskinan di Provinsi Indonesia Tahun 2010-2024

No	Provinsi	Persentase Rata-Rata Tingkat Kemiskinan
1	Papua	27,88
2	Papua Barat	24,38
3	Nusa Tenggara Timur	20,86
4	Maluku	18,86
5	Gorontalo	16,61
6	Aceh	16,55
7	Nusa Tenggara Barat	16,07
8	Bengkulu	16,05
9	Sulawesi Tengah	13,95

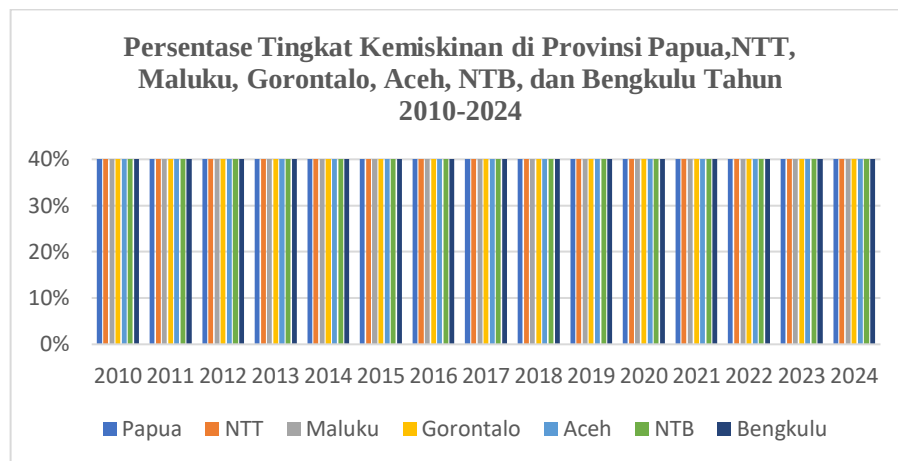
No	Provinsi	Persentase Rata-Rata Tingkat Kemiskinan
10	Lampung	13,66
11	Di Yogyakarta	13,37
12	Sumatera Selatan	13,10
13	Jawa Tengah	12,84
14	Sulawesi Selatan	12,51
15	Sulawesi Barat	11,99
16	Jawa Timur	11,82
17	Sumatera Utara	9,62
18	Sulawesi Selatan	9,34
19	Dki Jakarta	8,74
20	Jambi	8,02
21	Sulawesi Utara	8,01
22	Kalimantan Barat	7,69
23	Riau	7,69
24	Maluku Utara	7,23

No	Provinsi	Persentase Rata-Rata Tingkat Kemiskinan
25	Sumatera Barat	7,06
26	Kalimantan Utara	6,72
27	Kalimantan Timur	6,33
28	Kepulauan Riau	6,28
29	Banten	5,88
30	Kalimantan Tengah	5,68
31	Kepulauan Bangka Belitung	5,12
32	Kalimantan Selatan	4,75
33	Bali	4,37
34	Dki Jakarta	4,02
35	Papua Pegunungan	2,19
36	Papua Tengah	1,98
37	Papua Barat Daya	1,20
38	Papua Selatan	1,16

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan tabel 1.1 yang menyajikan persentase tingkat kemiskinan rata-rata menurut 38 provinsi di Indonesia, Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Bengkulu termasuk dalam kategori provinsi termiskin. Data kemiskinan pada provinsi-provinsi tersebut tersedia secara lengkap dan konsisten dari Badan Pusat Statistik atau Open Data Jabar untuk periode tahun 2010-2024, sehingga memungkinkan dilakukannya analisis yang akurat dan mendalam tentang dinamika kemiskinan di provinsi-provinsi tersebut.

Tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi termiskin di Indonesia menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dari rata-rata nasional. Provinsi-provinsi tersebut di antaranya Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Bengkulu, pada umumnya menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, seperti keterbatasan infrastruktur, akses terbatas ke pendidikan dan layanan kesehatan, serta ketergantungan pada sektor ekonomi yang kurang berkembang. Berikut adalah grafik data mengenai tingkat kemiskinan, IPM, ketimpangan pendapatan, TPT, dan TPAK menurut provinsi termiskin di Indonesia.



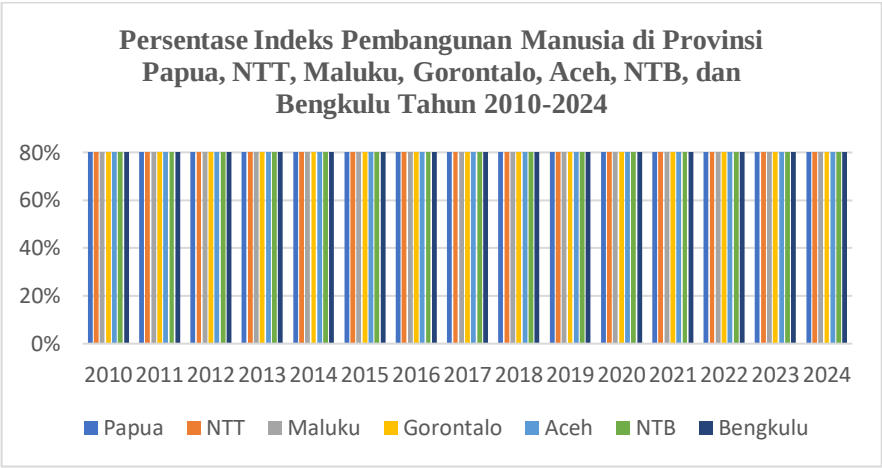
Grafik 1.1

Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua, NTT, Maluku, Gorontalo, Aceh, NTB, dan Bengkulu Tahun 2010-2024 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan grafik 1.1 tingkat kemiskinan di Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Bengkulu pada tahun 2010-2024 mengalami tren penurunan, meskipun dengan laju yang berbeda-beda. Kesenjangan antara provinsi Papua dengan provinsi lainnya tetap signifikan sepanjang periode. Terdapat periode stagnan atau perlambatan penurunan tingkat kemiskinan di beberapa tahun tertentu, yang mungkin berkaitan dengan kondisi ekonomi nasional atau kebijakan regional. Meskipun ada perbaikan selama 15 tahun, ke 7 provinsi tersebut tetap menjadi provinsi termiskin di Indonesia, yang menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan belum mampu mengubah posisi relatif mereka secara signifikan, upaya yang lebih insentif

dan strategi pembangunan yang lebih efektif masih sangat diperlukan, terutama untuk provinsi di Indonesia bagian timur seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.



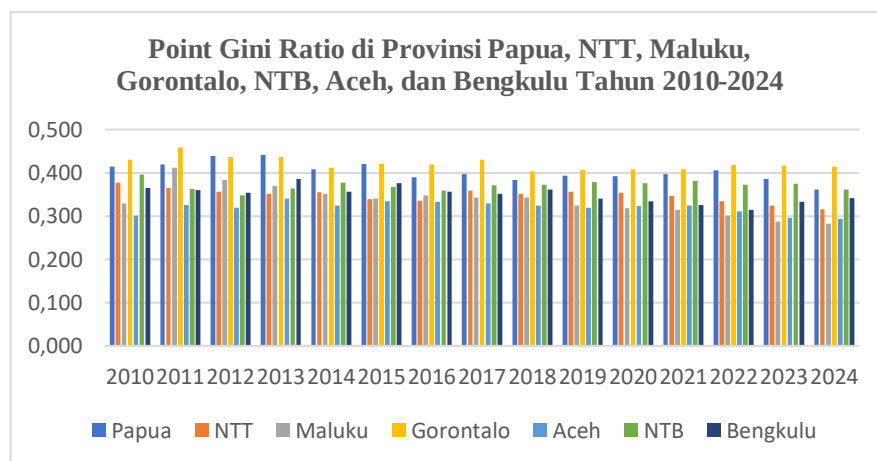
Grafik 1.2

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua, NTT, Maluku, Gorontalo, Aceh, NTB, dan Bengkulu Tahun 2010-2024 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan grafik 1.2 indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Bengkulu pada tahun 2010-2024 menunjukkan tren peningkatan IPM yang positif, menandakan adanya kemajuan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita. Kesenjangan antara Papua dengan provinsi lainnya tetap signifikan,

meskipun ada upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Provinsi Aceh, meskipun termasuk dalam tujuh provinsi termiskin, namun memiliki IPM tertinggi, yang menunjukkan bahwa pembangunan manusia tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan. Rata-rata peningkatan IPM untuk ke 7 provinsi adalah sekitar 50-75 poin selama 15 tahun, yang menunjukkan upaya pembangunan manusia yang konsisten namun belum cukup agresif untuk mengejar ketertinggalan dari provinsi lain di Indonesia.

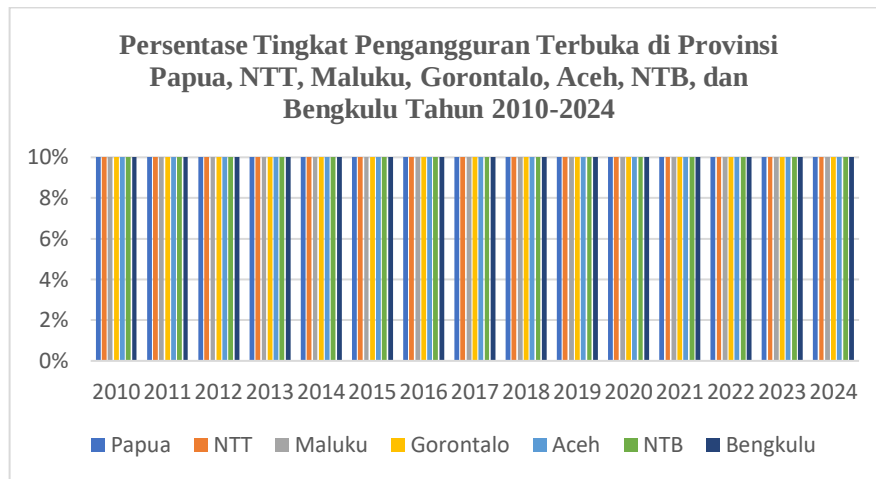


Grafik 1.3

Gini Ratio di Provinsi Papua, NTT, Maluku, Gorontalo, Aceh, NTB, dan Bengkulu Tahun 2010-2024 (point)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan grafik 1.3 gini ratio di Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Bengkulu mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak merata selama periode 2010-2024. Provinsi dengan gini ratio tertinggi ada di antara provinsi Gorontalo dan Papua. Sedangkan provinsi dengan gini ratio terendah ada di antara provinsi Maluku, Aceh, dan Nusa Tenggara Barat. Menurut Badan Pusat Statistik pada bulan September 2024, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan gini ratio tertinggi di Indonesia, yaitu 0,431. Koefisien gini dikembangkan oleh statistik Italia, Corrado Gini, dan dipublikasikan pada tahun 1912. Nilai gini ratio berkisar antara 0 hingga 1. Jika nilai gini ratio mendekati 1, maka tingkat ketimpangan pendapatan semakin melebar. Namun jika nilai gini ratio mendekati 0, maka distribusi pendapatan semakin merata. Klasifikasi ketimpangan berdasarkan gini ratio yaitu ketimpangan tinggi jika nilai gini ratio 0,5 atau lebih, ketimpangan sedang jika nilainya antara 0,30-0,49, dan ketimpangan rendah jika kurang dari 0,30. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, pada September 2024, gini ratio Indonesia tercatat sebesar 0,381, meningkat sedikit dibandingkan dengan Maret 2024 sebesar 0,379.



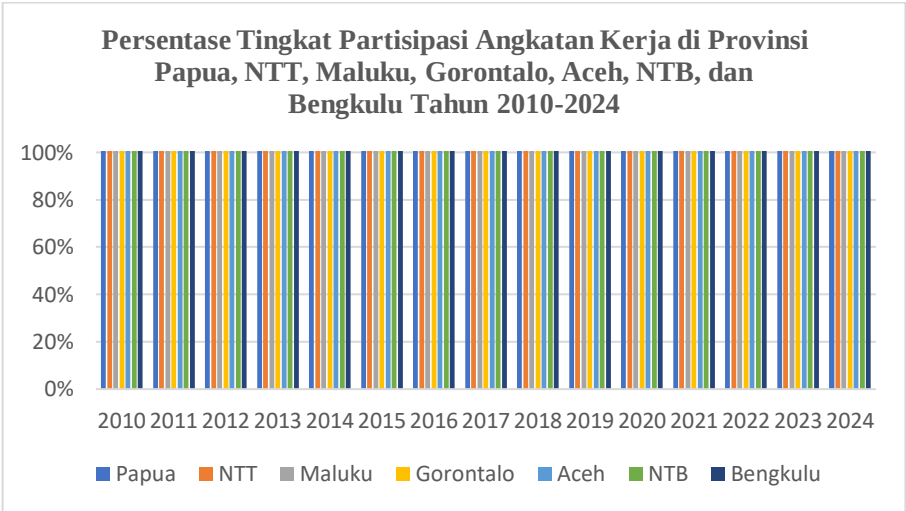
Grafik 1.4

Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Papua, NTT, Maluku, Gorontalo, Aceh, NTB, dan Bengkulu Tahun 2010-2024 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan grafik 1.4 tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Bengkulu mengalami fluktuatif. Selama periode 2010-2024 Provinsi Maluku merupakan provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi, dilanjutkan oleh Provinsi Aceh, dibandingkan dengan provinsi lainnya. Pada Awal tahun 2020 Provinsi Maluku tetap menjadi provinsi dengan TPT yang paling tinggi, mencapai 7,75 persen, lalu dilanjutkan oleh Provinsi Aceh mencapai 6,59 persen, hal tersebut dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Sedangkan TPT yang paling rendah pada tahun 2024 setelah usai pandemi Covid-19 adalah Provinsi Bengkulu mencapai 3,11 persen, lalu tidak jauh berbeda dengan Provinsi Gorontalo mencapai 3,13

persen, dibandingkan dengan provinsi lainnya. TPT dari ke 7 provinsi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan pemerintah. Proyeksi ke depan menunjukkan adanya tren penurunan TPT, namun tetap diperlukan upaya berkelanjutan dari semua pihak untuk memastikan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan di masing-masing provinsi. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Rakernas) Agustus 2024, TPT sebesar 4,91 persen, sedangkan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 7,47 juta orang.



Grafik 1.5

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Papua, NTT, Maluku, Gorontalo, Aceh, NTB, dan Bengkulu Tahun 2010-2024 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan grafik 1.5 tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Bengkulu mengalami penurunan dan peningkatan yang tidak merata. Provinsi dengan TPAK tertinggi adalah Provinsi Papua selama periode 2010-2023, lalu mengalami penurunan pada tahun 2024. Dilanjutkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan provinsi dengan TPAK terendah adalah antara Provinsi Maluku dan Aceh yang tidak berbeda jauh persentasenya. Menurut Badan Pusat Statistik TPAK pada Agustus 2024, Indonesia sebesar 71,10 persen. Angka ini naik 1,25 persen poin dibandingkan Agustus 2023. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024, jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 152,11 juta orang. Angka ini naik 4,40 juta orang dibandingkan Agustus 2023. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah pertanian, kehutanan dan perikanan.

Berdasarkan uraian di atas negara Indonesia kembali masuk dalam daftar 100 negara termiskin di dunia versi *Global Finance*. Daftar tersebut diterbitkan di situs resmi mereka pada 6 Mei 2024. Berdasarkan data tersebut, Indonesia berada di peringkat ke-90. Serta memiliki sebagian 7 wilayah provinsi termiskin di Indonesia dengan tingkat kemiskinan yang tercatat yaitu, Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Bengkulu. Provinsi tersebut dikatakan termiskin dengan tingkat kemiskinan tertinggi disebabkan oleh beberapa faktor seperti, IPM, ketimpangan pendapatan, TPT, dan TPAK.

Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya faktor-faktor tersebut terhadap tingkat kemiskinan, penulis ingin menganalisis terkait faktor IPM, ketimpangan pendapatan, TPT, dan TPAK terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, menggunakan metode kuantitatif, dengan judul penelitian **”ANALISIS PENGARUH IPM, KETIMPANGAN PENDAPATAN, PENGANGGURAN, DAN TPAK TERHADAP KEMISKINAN DI 7 PROVINSI TERMISKIN DI INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik tingkat kemiskinan di Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Bengkulu?
2. Seberapa besar pengaruh secara simultan dan parsial indeks pembangunan manusia, ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Bengkulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini memiliki tujuan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui karakteristik tingkat kemiskinan di Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Bengkulu.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara simultan dan parsial indeks pembangunan manusia, ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Bengkulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta berguna dalam memberikan kontribusi. Adapun manfaat penelitian terbagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang penelitian kemiskinan dan pembangunan manusia. Selain itu hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang

lebih mendalam mengenai hubungan antara faktor-faktor sosial ekonomi dan tingkat kemiskinan, serta mengembangkan teori-teori yang ada dalam konteks daerah tertentu di Indonesia. Diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan wawasan mengenai karakteristik dan dinamika kemiskinan di provinsi-provinsi yang berbeda, sehingga dapat memperkaya pemahaman tentang konteks regional dalam kajian pembangunan. Penelitian ini juga dapat menjadi topik untuk memperkenalkan atau mengembangkan metodologi baru dalam analisis data sosial ekonomi, yang dapat diadaptasi oleh peneliti lain di masa depan. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di Universitas Pasundan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Lembaga Pendidikan

Adanya penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dan mendorong penelitian lebih lanjut, baik oleh dosen maupun mahasiswa/i, dalam tema yang serupa atau terkait, dalam memahami faktor pengaruh tingkat kemiskinan di Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Bengkulu.

2. Bagi Masyarakat Umum

Adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

tingkat kemiskinan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan.

3. Bagi Mahasiswa/i

Adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi terbaru untuk belajar tentang metodologi penelitian dan analisis data yang dapat diterapkan dalam studi dan dapat membantu dalam mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja terutama di bidang yang berkaitan dengan ekonomi dan kebijakan publik, ataupun kepada mahasiswa/i yang tertarik untuk meneliti kajian ini lebih lanjut.

4. Bagi Penulis

Adanya penelitian ini dapat meningkatkan keterampilan analitis, penelitian, penulisan, dan ilmu pengetahuan baru bagi penulis. Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu sosial ekonomi, memperluas wawasan, dan perspektif. Proses penelitian juga dapat memberikan kesempatan bagi penulis untuk merefleksikan nilai, keyakinan, dan tujuan pribadinya dalam konteks sosial dan ekonomi pada saat ini ataupun di masa yang akan datang.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Penelitian ini akan mencakup lima provinsi di Indonesia, yaitu Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Bengkulu dalam periode 2010 hingga 2024, mencakup data tahunan yang relevan untuk memahami tren dan perubahan yang terjadi selama waktu tersebut. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis kuantitatif dengan statistik untuk menguji hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari lembaga pemerintah, seperti Badan Pusat Statistik dan lembaga terkait lainnya. Tingkat kemiskinan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu, IPM , ketimpangan pendapatan, TPT, dan TPAK. Fenomena yang mendasari penelitian ini adalah negara Indonesia yang termasuk negara miskin di Asia Tenggara.